

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah pecahnya reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, Indonesia mengalami masa sulit. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Setelah terjadinya pergantian pemerintahan banyak juga perubahan perundangan di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini maka proses pertumbuhan perekonomian pun ikut terganggu. Banyak penurunan dalam bidang ekonomi terutama dalam hal investasi asing. Penanaman investasi asing sendiri tersebar diberbagai wilayah salah satunya adalah Batam.

Batam merupakan wilayah yang memiliki karakter dan letak geografis tersendiri. Terletak diantara perairan selat Malaka dan selat Singapura. Secara geografis Pulau Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dengan Negara tetangga Singapura. Hal ini tentunya menempatkan Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi, baik propinsi Riau maupun nasional.

Batam sebagai tanah melayu memang terletak di inti jagat dunia melayu yang menjadi salah satu nadi dan nyawa perekonomian Indonesia saat ini. Batam sebagai salah satu wilayah yang sedang mencari bentuk pemerintahannya memiliki beraneka ragam etnis dan budaya. Dan keanekaragaman Batam tidak hanya dari segi etnis dan budaya serta karakter wilayahnya. Pertumbuhan perekonomian Batam jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan wilayah lain, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi

Sejarah perkembangan pulau Batam berawal dengan adanya kegiatan perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) pada tahun 1969. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai. Hingga dasawarsa 1960 an hampir seluruh kegiatan operasi dan logistik yang berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai dari para kontraktor bagi hasil (*production sharing*) Pertamina berpangkalan di Singapura. Padahal berdasarkan sistem pembagian bruto 15-85, Pertamina bukan hanya tinggal menerima 85 persen hasil, tetapi juga harus ikut menanggung 85 persen biaya kontraktor bersangkutan¹.

Banyak hal yang diharapkan dari pembangunan pulau Batam, terlihat jelas alasan mengapa perlu adanya pangkalan operasi dan logistik yang berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai, antara lain :

- a) Biaya pangkalan di Batam lebih murah jika dibandingkan dengan Singapura.
- b) Biaya pangkalan di Batam akan diserap pasar dalam negeri, sehingga dapat menghemat devisa dan menghidupkan perekonomian dalam negeri.

Pada tahun 1971, wilayah Batu Ampar ditetapkan sebagai daerah industri dengan status entreport partikulir untuk memfasilitasi kegiatan basis logistik dan operasional (Keppres 74/71, 26 Oktober 1971). Kemudian pada tahun 1973, melalui Keppres 41.71, 22 November 1973 seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam yang dikelola oleh dua lembaga

¹ Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, *Pulau Batam, Otorita Pengembangan*

baru, Lembaga pertama adalah perusahaan perseroan Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) yang bertugas menyelenggarakan perusahaan daerah industri. Lembaga kedua adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Pada tahun 1999 muncul UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 ayat 5 menyebutkan bahwa kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lainnya. Permasalahan kewenangan pengelolaan Pulau Batam, Rempang dan Galang (BaReLang) sehubungan dengan Undang-Undang tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan kota Batam dan Pemerintah kota Batam. Dikhawatirkan dengan dualisme tersebut akan menimbulkan konflik tersendiri di wilayah pulau Batam.

Agar dapat lebih menarik minat investor asing dilakukanlah berbagai terobosan yang bernilai strategis. Bentuk terobosan tersebut adalah dengan membenahi berbagai infrastruktur fisik, mengembangkan infrastruktur teknologi juga infrastruktur modal manusia, oleh karena itu infrastruktur yang dikembangkan pemerintah diharapkan bisa menjadi pemicu tahap awal industrialisasi. Namun pada tahun 1998 pasca reformasi para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya dikarenakan ini banyak faktor yang

Jika dilihat dari perkembangannya Batam banyak memiliki daya tarik dalam meningkatkan investasi asing. Sistem yang sederhana dan dalam waktu yang singkat menjadi faktor utama dalam menarik investasi asing sebanyak-banyaknya. Banyak pihak melihat bahwa poasisi strategis yang dimiliki Batam adalah sebagai faktor penentu keberhasilan yang diraih wilayah Batam seperti saat ini. Namun jika ditelaah lebih lanjut posisi strategis tersebut jika tidak dibarengi dengan upaya pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan disertai upaya membangun sistem kerja yang efisien, cepat, dan setara dengan tuntutan pelayanan internasional, maka tidak akan berjalan.

Pengembangan Batam dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu Tahap I (1973-1976) mencakup upaya persiapan, Tahap II (1976-1978) merupakan tahap konsolidasi, dan Tahap III (1978-1997) adalah tahap pembangunan prasarana/infrastruktur dan penanaman modal. Pada tahap IV (1998 dan seterusnya) yang diupayakan adalah mengakselerasi terwujudnya Batam sebagai kawasan Industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal dengan mempertahankan nuansa *social development*.

Setelah mempelajari tahapan perkembangan tersebut dapat kita lihat bahwa awal pertumbuhan Batam sesungguhnya dimulai dengan dipacunya pembangunan infrastruktur dan penanaman modal pada Tahap III. Pada tahap inilah, jaringan jalan, air, listrik dan semua prasarana pendukung dibangun. Dengan pembangunan tersebut diharapkan Batam dapat berkembang sesuai dengan rencana awal yang telah disusun dan dapat lebih menstandarkan diri sebagai wilayah industri yang dapat diperhitungkan

Batam merupakan wilayah kawasan industri sangat diharapkan menjadi sebuah lokomotif perekonomian nasional. Hal ini wajar karena bagi Indonesia setelah pembukaan Pulau Batam menjadi kawasan industri dan menarik perhatian para investor asing sejak tahun 1975 telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sejak Batamindo Industrial Park di Bangun sebagai wilayah kawasan industri di Batam pada tahun 1990 lalu sudah tercatat 82 perusahaan asing yang menanamkan modalnyadi Batam².

Perkembangan investasi asing yang terjadi di Pulau Batam pada pra tahun 1997 hingga tahun 1997 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Keadaan ini membuat para pakar ekonomi merasa yakin akan keberadaan Pulau Batam yang sungguh penting bagi peningkatan devisa negara. Setelah Pulau Batam berhasil membuat kawasan pabeannya menjadi daerah *entreport partikulir* yang berada di dalam daerah pabean, investasi asing maupun domestik mulai berdatangan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Batam, pemasukan total investasi asing swasta dan domestik Batam dari tahun 1990 sampai dengan 1997 mencapai angka 27,48 Juta US \$. Angka investasi asing tersebut sungguh menggembirakan bagi Indonesia karena dengan adanya jumlah investasi asing sebanyak ini memungkinkan Indonesia yang nantinya akan menjadi pusat perhatian negara berkembang di mata dunia internasional.

² Riau Pos, *Investasi Asing di Batam Terhenti*, 2005, 03 Maret 2005.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya dikawasan Batam terhitung banyaknya investasi asing yang masuk pada tahun 1990 sebanyak US\$ 684 juta. Jumlah ini dinilai sangat besar jika dilihat dari perkembangan Batam yang baru memulai pembangunannya. Peningkatan PMA di ikuti oleh tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1.1

Perkembangan Investasi Asing 1990 –1997 (US\$)

Tahun	Investasi Asing
1990	684
1995	1.916
1996	2.094
1997	2.145

Sumber : Batam Economic Report

Perkembangan investasi ditunjukkan dengan peningkatan yang sangat diharapkan (Lihat Tabel 1.1). Kondisi pulau Batam yang memungkinkan untuk menarik investasi dinilai sebagai hal yang utama dalam kenaikan tersebut. Kondisi tersebut tentunya didukung oleh berbagai fasilitas dan kemudahan dalam investasi. Namun lama kelamaan perkembangan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana Batam sudah mulai ketinggalan perkembangan investasinya jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan investasi lain di luar negeri. Filipina, Malaysia, dan Vietnam merupakan Negara yang memiliki wilayah industri namun tidak mengalami penurunan. (Lihat Tabel 2.2)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau Batam periode 1998-2003 mencapai 7,4 persen dan pertumbuhan industri sebanyak 11,4 persen dengan tingkat inflasi 4 persen³. Ini sedikit menurun 10 persen jika dibandingkan dengan tahun 1997. Padahal tingkat laju pertumbuhan ekonomi Batam 70 persen

³ <http://www.batam.go.id> (diakses pada tanggal 10 Mei 2004)

dihasilkan dari industri. Pada tahun 2002 terdapat investasi penanaman modal asing sebanyak 71 proyek dengan nilai USD 951,8 juta namun kemudian pada tahun 2003 investasi PMA (Penanaman Modal Asing) menurun dengan cepat yaitu 72 proyek dengan nilai hanya mencapai USD 147,5 juta⁴.

Tabel 1.2
Penanaman Modal Asing Di Batam tahun 1998-2003

Tahun	Jumlah Investasi (US \$)
1998	6,75
1999	2.332
2000	2.818
2001	8,8
2002	262
2003	138,31

Sumber: CSIS, 12 Agustus 2003

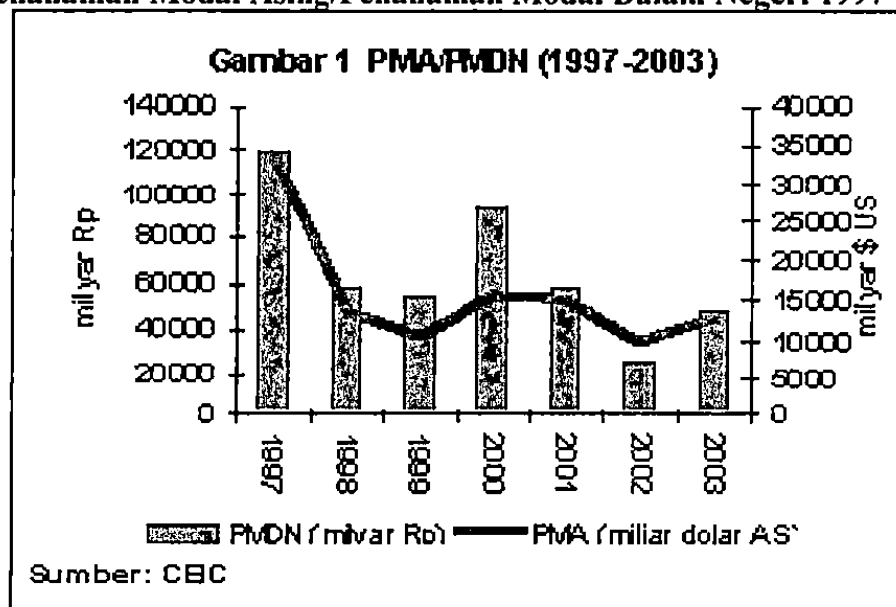
Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan investasi naik turun pada tahun 1998 terhitung investasi yang masuk sebesar US\$ 6,75 milyar. Dilanjutkan pada tahun 1999 dengan total investasi sebesar US\$ 2.332. Pada April 2002 realisasi PMA di Batam sebanyak 559 proyek dengan total investasi US\$ 262 milyar. Dengan jumlah tersebut bidang industri manufaktur telah menyerap banyak tenaga kerja.

Batam sebagai kawasan industri memiliki banyak penanam modal baik dari domestik maupun luar negeri. Berdasarkan Tabel 1.1 Penanaman Modal Asing di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1998 mengalami penurunan. PMA/PMDN pada tahun 1997 dinilai masa puncak investasi terbukti dengan nilai investasi sebesar US\$ 35,000, pada tahun 1998 menurun US\$ 16,000. (Lihat Gambar 1.1)

⁴ Riau Pos, *Investasi di Batam Merosot*, 2006, 21 Februari 2006
<www.riaupos.com/web/content/view/8398/20/>

Gambar 1.1

Penanaman Modal Asing/Penananaman Modal Dalam Negeri 1997-2003



Dengan menurunnya investasi dan pengembangan pembangunan di Batam tersebut maka perlu ditingkatkan koordinasi rencana pembangunan yang lebih matang, selain itu perlu adanya pengembalian konsep awal pembentukan Batam sebagai daerah *Free Trade Zone*, karena sejak awal pembentukan daerah Pulau Batam pengembangannya justru di mulai dari konsep *Free Trade Zone*, yang merupakan insentif yang pasti bagi pengusaha yang menanamkan investasinya di kawasan ini.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang terjadi, maka timbul sebuah permasalahan, yaitu :

“Mengapa investasi di Batam tahun 1998-2003 menurun?”

C. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian, keberadaan teori sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai kerangka analisa. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh peneliti akan dapat dipecahkan secara ilmiah dengan menggunakan bantuannya. Para peneliti melakukan konseptualisasi atas obyek yang diteliti. Kemudian teori menggabungkan konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep tersebut menjadi secara logis saling berhubungan⁵. Dengan demikian secara ilmiah persoalan akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Untuk mendapatkan hasil sempurna maka dalam penelitian kita harus menggunakan teori yang tepat. Hal ini dilakukan sebagai alat penentu hasil pengamatan atas obyek yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Teori sistem Politik David Easton. Teori ini mencoba membantu cara memandang, menilai dan menafsirkan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya berdasarkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat atau Negara tersebut.

Apa yang terjadi dalam sistem politik Indonesia sebenarnya tergantung dari pelaku politik itu sendiri dalam artian orang-orang yang terlibat didalamnya menjadi tokoh pemerintahan seperti Presiden dan Menteri sangat menentukan keberhasilan dari sistem politik yang dijalankan di Negara tersebut.

⁵ *System of Politics: An Introduction to Comparative Politics and Methods*, IRDS, Jakarta, 1999

Menurut Easton terdapat batasan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dimana pengalokasian nilai tersebut bersifat paksaan dan mengikat masyarakat sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku social, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat⁶. Persepsi mengandung unsur-unsur yang disebut sebagai nilai-nilai (*values*), keyakinan dasar (*belief*) dan data-data serta informasi yang diterima melalui proses kognitif (*cognitive*) yang serta keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung dan memungkinkan seseorang mampu memahami dan memperlakukan lingkungan dan masalah yang dihadapi dengan cara tertentu.

Teori ini pada prinsipnya memusatkan perhatian pada masalah yang timbul, bagaimana tingkah laku (*behavior*) pembuat keputusan untuk dapat memahami bagaimana suatu keputusan, tindakan atau tujuan yang dihasilkan.

Dalam memahami sistem politik perlu pula pengetahuan mengenai ciri-ciri sistem politik tersebut, untuk itu David Easton mengidentifikasikan ciri utama sistem politik sebagai berikut :

1. Ciri-ciri Identifikasi

Untuk dapat membedakan sistem politik dengan sistem social yang lain maka kita diharapkan dapat mengidentifikasikan atau mengenali sistem politik dengan mendeskripsikan setiap bagian yang tepat mengenai sasaran dan menetapkan batas-batas yang memisahkan bagian tersebut dari unit yang berada di luar sistem politik. Batas sistem politik dapat

⁶ Hamanto Dan, *Sistem Politik : Suatu Pendekatan Liberty*, Yogyakarta, 1982, hal 2

dinyatakan dengan semua tindakan atau kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat, dengan kata lain hal-hal yang tidak sesuai dengan atau tidak mengandung ciri identifikasi akan dikeluarkan dari sistem politik.

2. Input dan Output

Kita mengetahui bahwa setiap politik yang kita pilih sebagai pilihan dikarenakan kita memiliki kepercayaan bahwa sistem politik memiliki konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan yang bersifat otoritatif. Jika suatu sistem politik itu tidak dapat menghasilkan output yang dapat di mengerti oleh masyarakat atau dapat membawa keuntungan bagi mereka maka sistem tersebut akan terus berjalan namun tidak akan diterima oleh masyarakat. Sistem politik harus mendapatkan input untuk bekerja, tanpa adanya input sistem tidak dapat bekerja dan begitu juga sebaliknya.

3. Environment (Lingkungan)

Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di lingkungannya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk kedalam sistem politik.

Dalam kaitannya dengan investasi, Batam banyak memiliki keunggulan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Lingkungan yang kondusif dan aman membuat para investor tidak akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal mereka terutama di kawasan Batam yang

terkenal dengan wilayah industrinya. Sebagai pelaku dalam lingkungan politik, PMA sangat rentan terhadap segala kebijakan yang terjadi dalam perputaran politik suatu Negara.

Dengan adanya keraguan pada pihak investor membuat pemerintah Indonesia mengadakan suatu pengolahan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan keberhasilan Pulau Batam dalam peningkatan pemasukan terutama dalam hal penanaman modal asing. Banyak kasak kusuk yang beredar dikalangan investor dan menimbulkan permasalahan baik dikalangan pengusaha maupun pemerintah kota Batam dan Otorita Pengembangan daerah industri Pulau Batam.

Keraguan dunia usaha terhadap status batam membuat pemerintah bingung dalam menentukan arah kebijakan yang akan diletakkan sebagai landasan hukum Batam. Sampai sekarang pun belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut, padahal dengan sikap yang demikian dapat merugikan Batam sebagai daerah industri yang cukup diperhitungkan.

Dalam membahas sistem politik, maka dapat dirasakan perlu untuk membahas kemampuan sistem politik. Salah satu kegunaan atau manfaat mengetahui kemampuan sistem politik adalah apabila kita ingin membandingkan sistem politik satu dengan sistem politik yang lainnya. Dengan mengetahui sistem politik yang dianut suatu Negara maka kita dapat mengetahui kemampuan sistem sebagai politik satu Negara dengan Negara lain. Sistem politik juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kemampuan sistem politik suatu

Negara dalam periode tertentu, dengan kata lain sistem politik dapat dijadikan sebagai alat ukur atau barometer berhasil atau tidaknya suatu sistem politik.

Bagi Indonesia perubahan perundangan terjadi karena adanya perubahan pemerintahan, dimana pasca reformasi system pemerintahannya seperti tidak jelas arah tujuannya. Setelah rezim Soeharto lengser dari kursi kekuasaannya, banyak nama baru yang ikut menghiasi tampuk pemerintahan Indonesia. Pergantian ini berimbas kepada peraturan pemerintah yang selalu berganti sesuai dengan penguasa yang baru.

Pergantian ini juga menimbulkan masalah ekonomi dimana terdapat krisis yang berkepanjangan, serta penurunan investasi didaerah terutama di Batam. Pada kasus Batam pemerintah belum jelas menentukan akan menyandang nama apa Batam. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang sebelumnya kekuasaan di Batam di pegang oleh satu lembaga yaitu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB), namun dengan dikeluarkannya UU Otonomi tersebut timbul dua pemegang kekuasaan Batam.

Pemerintah Indonesia melakukan pergantian perundangan terhadap status Batam dengan harapan agar terdapat perubahan dalam kasus krisis Indonesia. Terutama dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2003 tentang pajak, diharapkan dengan penarikan pajak barang maka akan meningkatkan pendapatan Negara. Bagi Indonesia ini akan memberikan keuntungan bagi pemasukan

Setelah tahun 1997 krisis ekonomi di Indonesia dengan cepat berkembang menjadi krisis politik dan kewibawaan⁷. Tahun 1998 gaung reformasi menjadi satu slogan yang banyak dilontarkan oleh jutaan orang Indonesia yang menuntut pergantian pemerintahan dan perbaikan berbagai kondisi social yang memburuk. Hal ini menyebabkan Indonesia mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh wilayah di Indonesia terutama Batam, alasan wilayah Batam menolak Undang-Undang tersebut berkaitan dengan ketidakpastian hukum Batam dan hal ini dapat menyulitkan posisi Batam sebagai kawasan investasi. Lain lagi dengan Riau yang menolak adanya Otorita, karena dikhawatirkan akan timbul Otorita Natuna dan Otorita lainnya.

Adapun teori lainnya yang bersifat mendukung atas pengembangan investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam tiap tahunnya, penulis mengacu pada **Teori Penanaman Modal**. Menurut Alan M. Rugman, "*The factors which determine the foreign investment are the environment variable and the internalization variable*". Teori ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi⁸.

⁷ Heryanto Ariel, Mandal K. Sumit, *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara : Perbandingan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Kenustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2004. hal 13

1. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliuti semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja dan modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*.

Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya sosial yang melekat pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good govermance*), baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanaman modal itu.

2. Variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal. Hal mana setiap penanam modal sebisa-mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan investasi asing dan ekspor di dalam negeri. Apabila perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia mengalami kelesuan, terutama Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia, hal ini akan mempersulit Indonesia dalam proses pemulihannya, karena selama ini negara-negara tersebut merupakan mitra Indonesia yang sangat penting dalam perdagangan, investasi dan pinjaman, atau bantuan luar negeri.

Dari hasil-hasil studi kualitatif yang dilakukan di tahun 1990-an menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dikatakan bahwa, investasi bukan progres teknologi tetapi merupakan faktor utama dibalik pertumbuhan yang cemerlang. Di mana investasi dapat menambah jumlah lapangan kerja dan oleh karena itu produksi meningkat, untuk itu pemerintah perlu memperbaiki peraturan mengenai investasi itu sendiri. Kebijakan tentang investasi harus radikal dan revolusioner untuk menarik kembali investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terkait dengan hal investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam, Pulau Batam mempunyai variabel lingkungan yang lebih baik daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Selain lokasi Pulau Batam yang strategis, pulau Batam terletak pada selat Malaka dimana selat tersebut merupakan jalur perdagangan yang ramai dilalui oleh banyak kapal-kapal dalam negeri maupun luar negeri. Wilayah Batam juga wilayah yang dekat dengan negara Singapura dan Malaysia

Kemudian Pulau Batam variabel ekonomi yang baik, dimana di Batam banyak tersedia tenaga kerja yang murah serta tersedianya keterampilan manajemen yang handal dari Pemerintah Kota Batam.

Sedangkan untuk variabel non-ekonomi, Pulau Batam termasuk wilayah yang stabil akan kondisi politik dan budaya sosial yang baik dalam unsur masyarakat Batam serta Batam juga termasuk wilayah dengan pemerintahan daerah (*host country*) yang bersih dan berwibawa bagi kedatangan para investor asing yang ingin menanamkan investasi asingnya di Kawasan Industri Pulau Batam.

Kondisi perpolitikan Batam memang terbilang aman-aman saja. Sehingga kondisi politik yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya arus masuk investasi ke Batam tidak terjadi. Selain hal ini keunggulan lain banyak ditawarkan oleh pemerintah Batam untuk menarik investor menanamkan modalnya di Batam. Wilayah Batam banyak menawarkan berbagai fasilitas yang menguntungkan baik dari segi prasarana dan infrastruktur. Prosedur investasi yang mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi Batam.

Meskipun Batam tidak memiliki sumber daya alam yang dapat membantu dalam proses investasi, namun kelebihan daya tarik tersebut ditunjukkan dengan banyaknya tenaga kerja yang dapat ditarik untuk bekerja pada perusahaan asing. Tenaga kerja di Batam memang banyak datang dari luar daerah Batam dan memang sengaja ingin mencari kerja di Batam. Prospek kerja Batam memang menjanjikan bagi para pencari kerja

D. Hipotesa

Pada dasarnya wilayah Batam dengan potensi yang dimilikinya mempunyai peluang untuk menjadi Bandar dunia yang mandiri, maju, dan sejahtera serta berkepribadian bangsa. Dengan dijadikannya Batam sebagai wilayah yang strategis untuk berinvestasi membuat Indonesia juga tidak kalah dengan Negara lain. Namun demikian tingkat penurunan investasi asing lama kelamaan membuat kondisi Batam di ambang keragu-raguan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka kesimpulan sementara adalah :

Penurunan investasi di Batam terjadi karena :

- Perubahan status Hukum Indonesia terhadap Batam.
- Kebijakan Ekonomi terhadap tingkat kenaikan harga.
- Keraguan Dunia Usaha Untuk Menanamkan Modal nya di Batam.

E. Jangkauan Penelitian

Skripsi ini meneliti tentang penyebab penurunan investasi asing di Batam pada periode 1998-2003, banyak faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi. Perubahan status hukum wilayah Batam terhadap proses penurunan investasi. Perubahan sistem pemerintahan mengakibatkan para investor ragu untuk menanamkan modalnya. Investasi asing yang menanamkan modalnya di wilayah Batam. Proses investasi dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas masa

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Berisi Latar Belakang Masalah, perumusan Masalah tentang Penyebab penurunan investasi asing di Batam, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian dan Sistematika penulisan.
- BAB II** Menjelaskan tentang Sejarah Awal Batam serta Perkembangan Pulau Batam yang diawali oleh kegiatan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) pada tahun 1969 untuk menjadikan Pulau Batam Logistik dan Operasional yang berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai. Pada bagian ini juga akan dijelaskan peranan Batam sebagai indikator bagi Indonesia dalam penanam modal asing.
- BAB III** Menjelaskan tentang Investasi asing di Batam, Peraturan yang mengatur kegiatan investasi, Batam sebagai kawasan Free Trade Zone, Alasan ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di wilayah Batam serta Perumusan investasi

BAB IV

**Analisa faktor-faktor menurunnya investasi di Batam
baik dari segi hukum berkaitan dengan status wilayah
Batam maupun dari segi ekonomi**